



PENDAMPINGAN PEMBUATAN APBKal SEBAGAI BENTUK TRANSPARANSI PUBLIK PEMERINTAH KALURAHAN ARGOREJO, KAPANEWON SEDAYU, KABUPATEN BANTUL

Oleh

Nadya Putri Ayu Darmawati¹, Martinus Budiantara^{2*}

^{1,2}Program Studi Akuntansi, Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Indonesia

E-mail: ¹200610017@student.mercubuana-yogya.ac.id, ²budiantara@mercubuana-yogya.ac.id

Article History:

Received: 19-02-2023

Revised: 27-02-2023

Accepted: 18-03-2023

Keywords: Pendampingan,
Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kalurahan (APBKal),
Transparansi

Abstract: Rencana keuangan yang melingkupi landasan manajemen terhadap pendapatan, biaya pada kurun waktu satu tahun disebut anggaran. Setiap pemerintah desa wajib membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) sebagai dasar penggunaan dana desa. Pembuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) adalah salah satu bentuk transparansi yang dilakukan pemerintah untuk publik. Tahap pembuatan anggaran merupakan tahap yang sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berpusat pada kinerja akan bisa menggagalkan program yang telah disusun sebelumnya. Dengan adanya transparansi pemerintah akan menampilkan pemerintahan yang bekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku. Begitu pentingnya APBKal dibuat setiap tahun, maka diperlukan pengetahuan dan pemahaman terkait bagaimana tahapan pembuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku bagi pihak-pihak yang terlibat. Artikel ini memaparkan kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan dengan memberikan pendampingan pembuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) kepada perangkat desa, di Kalurahan Argorejo, Kapanewon Sedayu, Kabupaten Bantul.

PENDAHULUAN

Peraturan perundang-undangan tentang otonomi daerah terakhir diperbaharui pada (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengatur bahwa dengan adanya wewenang otonomi daerah masing-masing pemerintah daerah diberikan hak, wewenang dan kewajiban untuk bisa mengatur pemerintahan dan masyarakat setempat dalam prosedur Negara Kesatuan Republik Indonesia (C. Kuntandi et al., 2023)

Anggaran adalah rencana keuangan dalam waktu yang akan datang yang melingkupi landasan manajemen terhadap pendapatan, biaya pada kurun waktu satu tahun. Pada konteks anggaran organisasi sektor publik, anggaran melingkupi program-program tentang



berapa biaya terhadap rencana yang disusun dan berapa banyak serta bagaimana cara mendapatkan dana untuk mendanai rencana tersebut. Tahap pembuatan anggaran merupakan tahap yang sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berpusat pada kinerja akan bisa menggagalkan program yang telah disusun sebelumnya. Sering ditemui dalam penerapan pembuatan anggaran seperti merupakan bagian yang tersisih dengan pembuatan dan perancangan skema sehingga keberhasilan implementasi anggaran tidak searah dengan keberhasilan program dan tujuan organisasi. Penganggaran seperti ini tidak mampu membuat anggaran yang efektif sebagai alat manajemen untuk mempertemukan pencapaian arah sesuatu yang dituju organisasi.

Unsur utama pendapatan suatu daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang legal, dan lain-lain. Sementara itu, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat berasal dari dana bagi hasil pajak, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Kemandirian suatu daerah dalam mengelola potensi sumber pendapatan tergambar pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang didapatkan, serta ditunjukkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain. Skala independensi bertujuan untuk menciptakan keterlibatan daerah kepada sumber dana luar dan menciptakan tingkat keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan daerah (Halim, 2007:233) dalam (C. Kuntandi et al., 2023).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) merupakan perencanaan keuangan tahunan pemerintahan kalurahan yang direncanakan dan ditentukan oleh Lurah bersama dengan Badan Permusyawaratan Kalurahan dengan tetap memperhatikan Peraturan Kalurahan. Bahwa untuk mengetahui efektivitas, tingkat perkembangan desa dan kalurahan, kemajuan, kemandirian, keberlanjutan pembangunan, kesejahteraan masyarakat serta daya saing desa dan kalurahan melalui pembangunan Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, Diperlukan evaluasi perkembangan desa dan kalurahan dengan cara melalui pembuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal). Dalam pembuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) ini, Pemerintah Kalurahan Argorejo memperhatikan dari unsur kebutuhan, dan unsur manfaat dari sisi banyaknya pengguna fasilitas anggaran tersebut, Sehingga setiap Anggaran yang dibelanjakan akan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat setara dengan kebutuhannya.

Akurasi Perencanaan pembuatan Anggaran tersebut akan berpengaruh terhadap Perencanaan Anggaran belanja suatu daerah khususnya belanja modal pemerintah dalam rangka meningkatkan kondisi sarana dan prasarana di daerahnya menjadi lebih unggul. salah satu unsur Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pajak daerah memberikan pengaruh yang relevan terhadap belanja modal daerah. Oleh sebab itu, elemen-elemen yang mempengaruhi pengembangan dan penyusutan Pendapatan menjadi hal yang pokok dalam menetapkan besaran anggaran yang dibuat. Ketidaktepatan pemerintah daerah dalam menganggarkan pendapatan tersebut akan berpengaruh pada penyimpangan penilaian kinerja penerimaan pendapatan suatu daerah serta kemampuan tidak terlaksananya perencanaan aktivitas dan Perencanaan pembuatan Anggaran belanja daerah khususnya untuk daerah yang baru mengalami pemekaran serta pembentukan provinsi dan kabupaten/kota secara maksimum (C. Kuntandi et al., 2023).



Transparansi merupakan pilar yang menjamin akses atau keleluasaan bagi setiap orang untuk mendapatkan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yaitu melingkupi penjelasan tentang program dan rencana kegiatan, proses penyusunan dan penerapannya, serta hasil-hasil yang diperoleh. Transparansi yaitu adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan, sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap perspektif kebijakan pemerintah yang dapat diperoleh oleh publik. Keterbukaan penjelasan diinginkan akan menciptakan kompetisi politik yang sehat, saling menghargai, dan kebijakan dibuat berdasarkan pada selera masyarakat. Transparansi berarti suatu keterbukaan secara nyata, menyeluruh, dan memberi ruang kepada seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pengelolaan sumber daya politik Ulya & Astuti dalam (Aldi et al., 2023)

Untuk mewujudkan prinsip transparansi serta mengakui bahwa capaian penggunaan dana desa benar-benar terjadi, mekanisme penyaluran dana mewajibkan beberapa kriteria yang harus dipenuhi terlebih dahulu, baik pada pemerintah desa sebagai pemakai dana desa sekalipun oleh kabupaten/kota. Ketentuan dengan penyaluran dana desa diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 193/PMK.07/2018 tentang pengelolaan dana desa. Transparansi dalam pengelolaan pemerintah desa dapat menekankan kepada pemerintah untuk terbuka akan hak-hak masyarakat dalam menerima informasi yang akurat dan jujur mengenai kebijakan dan program pemerintah. Melalui adanya transparansi pada kegiatan operasi publik salah satunya dibidang keuangan mampu memudahkan pengamatan terhadap pemerintahan. Dengan begitu pemerintah akan menampilkan pemerintahan yang bekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, kinerja pemerintah desa pun akan meningkat maju.

Belanja kalurahan, atau yang dikenal dengan pengeluaran pemerintah desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal), merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah desa, bersamaan dengan pendapatan pemerintah desa. Semakin besar belanja diharapkan akan meningkatkan kegiatan perekonomian daerah. Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah desa dalam organisasi sektor publik yaitu mengenai pengalokasian anggaran. Pendistribusian anggaran merupakan jumlah porsi dana untuk masing-masing program rencana kegiatan. Dengan sumber daya yang tidak banyak, pemerintah desa harus dapat mengalokasikan pendapatan yang diperoleh untuk belanja yang bersifat bermanfaat dan berguna. Biaya yang dimaksud adalah estimasi beban yang dikeluarkan desa yang didistribusikan secara adil dan merata agar relatif dapat digunakan oleh seluruh kumpulan masyarakat tanpa pembedaan, terlebih lagi dalam pemberian pelayanan umum.

Kegiatan Pendampingan Pembuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) ini dilakukan untuk mendampingi apakah pemerintah desa argorejo telah menggunakan anggaran pendapatan dan belanja kalurahan secara ekonomis, efisien, dan efektif untuk menuju desa yang maju di Kalurahan Argorejo, Kapanewon Sedayu, Kabupaten Bantul.

METODE

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Kalurahan Argorejo, Kapanewon Sedayu, Kabupaten bantul. Berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah desa dalam organisasi sektor publik yaitu mengenai pengalokasian anggaran, tujuan dan solusi yang



ditawarkan, maka metode pengabdian yang dilaksanakan yaitu berupa Pendampingan Pembuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal). Teknik pengumpulan data meliputi diskusi dengan pihak kalurahan, pengambilan data Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) tahun sebelumnya yang nantinya akan dijadikan bahan dasar Pembuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) tahun anggaran 2023. Kegiatan pendampingan ini terdiri dari beberapa kegiatan sebagai berikut :

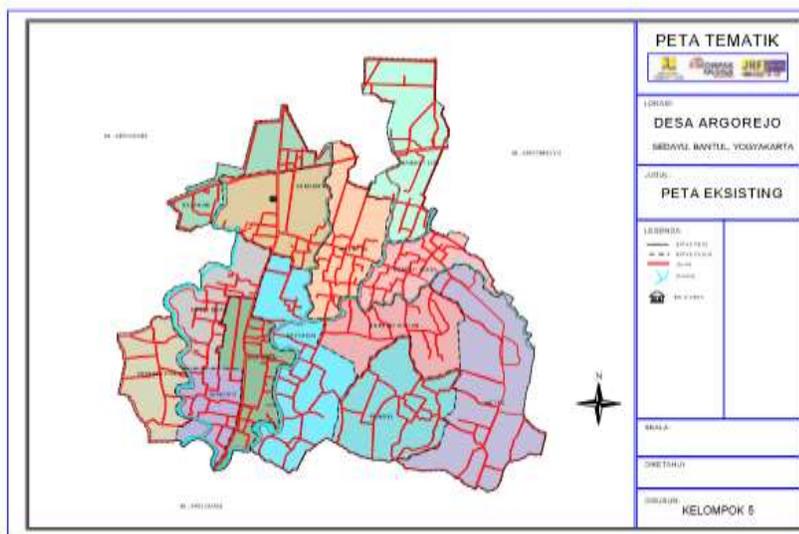
1. Pelaksanaan kegiatan pendampingan dilakukan secara intensif selama satu bulan, yaitu dari 31 Januari sampai dengan 28 Februari 2023.
2. Pelaksanaan kegiatan pendampingan ini dilakukan dengan metode diskusi, diskusi dilakukan untuk mengali persoalan yang berhubungan dengan pembuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal). Selain itu diskusi ini juga untuk mencari solusi terkait permasalahan-permasalahan yang sering dihadapi dalam pembuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal).

HASIL

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Kalurahan Argorejo bagian dari Kabupaten Bantul dan merupakan salah satu desa yang terdapat di wilayah Kabupaten Bantul dan dari salah satu wilayah Kapanewon Sedayu. Kalurahan Argorejo memiliki luas wilayah sebesar 723 Hektar, dan secara administratif Pemerintahan kalurahan argorejo terbagi menjadi 13 (tiga belas) Pedukuhan.

Wilayah Kelurahan Argorejo memiliki batas - batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kalurahan Argosari, Kapanewon Sedayu.
- Sebelah Timur : Kalurahan Argomulyo, Kapanewon Sedayu.
- Sebelah Selatan : Kalurahan Argodadi, Kapanewon Sedayu.
- Sebelah Barat : Kalurahan Argosari, Kapanewon Sedayu



Gambar 1. Peta Wilayah kalurahan Argorejo



Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan anggaran adalah penyaluran dana dari APBN ke pemerintah desa. Meskipun Dana Desa merupakan hak pemerintah desa, tetapi dalam pelaksanaannya penyaluran Dana Desa tetap melibatkan fungsi dan peran pemerintahan sesuai dengan wewenangnya. Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal), dana yang diperoleh akan dialokasikan kepada setiap padukuhan secara adil dan merata, dalam hal ini Pemerintah Kalurahan Argorejo akan mengalokasikan dana nya ke 13 padukuhan. Dana yang dialokasikan untuk setiap padukuhan tersebut akan digunakan untuk mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, dan mengatasi pembangunan antardesa, dan bagi kalurahan sendiri dana yang didapat salah satu manfaatnya adalah untuk meingkatkan pelayanan publik di desa.

Kegiatan pendampingan ini dilakukan secara bertahap, yang artinya tidak hanya dilaksanakan dalam satu kali waktu saja. Kegiatan pendampingan diawali dengan tahapan pertama dengan melakukan aktivitas pembuatan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) tahun anggaran 2022, hal ini dilakukan agar laporan realisasi dapat digunakan sebagai dasar pembuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) tahun anggaran 2023. Pada Pendampingan awal ini dilakukan diskusi dalam hal perencanaan dan pengelolaan keuangan desa. Pendampingan dilanjutkan secara fokus, dengan selalu berdiskusi bagaimana cara untuk menyusun anggaran yang efektif, dimana para staf pegawai kalurahan wajib memiliki keterampilan dalam membuat anggaran sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Tabel 1. Laporan Realisasi APBKal Kalurahan Argorejo Tahun Anggaran 2022

Keterangan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(Lebih)/Kurang (Rp)
Pendapatan Asli Kalurahan	182.000.000	95.049.000	86.951.000
Pendapatan Transfer			-
Dana Desa	1.248.709.000	1.248.709.000	-
Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	411.387.800	411.387.800	-
Alokasi Dana Desa	1.263.741.000	1.263.741.000	-
Bantuan Keuangan Provinsi	63.000.000	63.000.000	-
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	855.000.000	855.000.000	-
Pendapatan Lain-lain	41.600.000	24.758.993	16.841.067
Jumlah Pendapatan	4.065.437.800	3.961.645.733	103.792.067
Belanja bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan	2.092.753.551	2.015.256.304	77.497.247
Belanja bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan	1.370.495.250	1.287.870.250	82.625.000
Belanja bidang Pembinaan Kalurahan	278.320.250	225.304.250	53.016.000
Belanja bidang Pemberdayaan Masyarakat	128.695.222	110.198.500	18.496.772



Kalurahan			
Belanja bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Kalurahan	529.146.759	523.600.000	5.546.759
Jumlah Belanja	4.399.411.032	4.162.229.304	237.181.728
Surplus/(Defisit)	333.973.232	200.583.571	133.389.661
Penerimaan Pembiayaan	338.973.232	323.973.105	15.000.127
Pengeluaran Pembiayaan	5.000.0000	0	5.000.000
Pembiayaan Netto	333.973.232	323.973.105	10.000.127
Slipa Tahun Berjalan	-	123.389.534	123.389.534

(Sumber: Data Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Argorejo)

LAPORAN REALISASI APBKAL PEMERINTAH KALURAHAN ARGOREJO KAPANEWON SEDAYU KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2022			
	Anggaran	Realisasi	Lebih/ Kurang
PENDAPATAN			
Pendapatan Asli Kalurahan	182.000.000	95.049.000	86.951.000
Pendapatan Transfer			
Dana Desa	1.248.709.000	1.248.709.000	-
Bagian dr hasil pajak dan Retribusi Daerah	411.387.800	411.387.800	-
Alokasi Dana Desa	1.263.741.000	1.263.741.000	-
Bantuan Keuangan Provinsi	63.000.000	63.000.000	-
Bantuan Keuangan kabupaten/Kota	855.000.000	855.000.000	-
Pendapatan Lain-lain	41.600.000	24.758.933	16.841.067
JUMLAH PENDAPATAN	4.065.437.800	3.961.645.733	103.792.067
BELANJA			
Bidang Penyelenggaran Pemerintah Kalurahan	2.092.753.551	2.015.256.304	77.497.247
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan	1.370.495.250	1.287.870.250	82.625.000
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan	278.320.250	225.304.250	53.016.000
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	128.695.222	110.198.500	18.496.722
Bidang Penanggulangan, Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Kalurahan	529.146.759	523.600.000	5.546.759
JUMLAH BELANJA	4.399.411.032	4.162.229.304	237.181.728
SURPLUS/(DEFISIT)	- 333.973.232	- 200.583.571	- 133.389.661
PEM BIAYAAN			
Penerimaan Pembiayaan	338.973.232	323.973.105	15.000.127
Pengeluaran Pebiayaan	5.000.000	0	5.000.000
PEM BIAYAAN NETTO	333.973.232	323.973.105	10.000.127
SILPA TAHUN BERJALAN	-	123.389.534	- 123.389.534

Gambar 2. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Argorejo TA. 2022 dalam format excel



REALISASI APBDWI KALURAHAN ARGOREJO TAHUN ANGGARAN 2022

JENIS PENDAPATAN	ANGGARAN	REALISASI
1 Pendapatan Asli Kalurahan	Rp 170.000.000	Rp 89.948.000
2 Dana Desa	Rp 1.248.709.000	Rp 1.248.709.000
3 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	Rp 413.387.890	Rp 413.387.890
4 Alokasi Dana Desa	Rp 1.303.831.500	Rp 1.303.741.000
5 Bantuan Keuangan Provinsi	Rp 63.000.000	Rp 63.000.000
6 Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	Rp 855.000.000	Rp 855.000.000
7 Pendapatan Lain-lain	Rp 53.600.000	Rp 54.788.885
Jumlah	Rp 4.055.437.890	Rp 3.961.646.775

BELANJA	ANGGARAN	REALISASI
1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	Rp 2.065.783.880	Rp 2.038.398.504
2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan	Rp 1.570.888.280	Rp 1.587.870.580
3 Bidang Pembinaan Masyarakat Kalurahan	Rp 378.229.280	Rp 328.304.380
4 Bidang Penyelenggaraan Kecamatan Kalurahan	Rp 108.085.120	Rp 108.088.800
5 Bidang Penyelenggaraan Bina Desa, Negeri Darurat dan Perantara	Rp 826.140.780	Rp 826.800.000
Jumlah	Rp 4.399.419.320	Rp 4.302.228.264

PENDAYAAN	ANGGARAN	REALISASI
1 Investasi Pembiayaan	Rp 338.973.320	Rp 338.973.320
2 Pengeluaran Pembiayaan	Rp 8.000.000	Rp -
Jumlah TAUN BERIKUT	Rp -	Rp 338.973.320

LAPORAN REALISASI ANGGARAN 2022 TELAH DITUNGGU DALAM PERATURAN KALURAHAN ARGOREJO NOMOR 01 TAHUN 2023

Gambar 3. Hasil Pembuatan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Argorejo TA. 2022 yang dipublikasikan ke publik

Setelah membuat Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Argorejo, tahapan selanjutnya adalah kegiatan pendampingan pembuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal). Pendampingan ini dilakukan dengan memberikan penjelasan tentang pentingnya kegiatan penganggaran, dan dilanjut dengan pembuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan dengan baik dan benar. Kegiatan pendampingan ini telah mencapai kinerja yang telah dilakukan yaitu berhasil dan sukses melakukan pembuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) berbasis excel. Dari hasil pendampingan ini diantaranya dihasilkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Argorejo Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

Tabel 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Argorejo Tahun Anggaran 2023

Keterangan	Anggaran (Rp)
Pendapatan Asli Kalurahan	170.000.000
Dana Desa	1.248.709.000
Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	329.931.172
Alokasi Dana Desa	1.303.831.500
Bantuan Keuangan Provinsi	63.000.000
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	855.000.000
Pendapatan Lain-lain	53.600.000
Jumlah Pendapatan	3.871.071.672
Belanja bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan	2.362.212.581
Belanja bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan	1.710.719.500
Belanja bidang Pembinaan Kalurahan	226.456.250



Belanja bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	363.449.750
Belanja bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Kalurahan	160.200.000
Jumlah Belanja	4.823.038.081
Penerimaan Pembiayaan	486.394.715
Pengeluaran Pembiayaan	5.000.0000
Pembiayaan Netto	481.394.715

(Sumber: Data Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Argorejo)

I. Bidang Pendapatan			II. Bidang Belanja		
No	Jenis Pendapatan	Anggaran	No	Belanja	Anggaran
1	PAD	17.000.000	1	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	363.449.750
2	Dana Desa	1.348.700.000	2	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Kalurahan	160.200.000
3	Revisi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	528.951.175	3	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan	1.750.719.500
4	Retribusi Daerah Desa	1.003.863.100	4	Bidang Pemberian Insentif	226.456.250
5	Bantuan Keuangan Provinsi	68.000.000	5	Bidang Pembiayaan Masyarakat	388.688.715
6	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	855.000.000	6	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Kalurahan	160.200.000
7	Pembiayaan Lain-lain	10.000.000		Jumlah	4.823.038.081
	Jumlah	2.362.212.581		Pembiayaan	
			1	Penerimaan Pembiayaan	486.394.715
			2	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000
				Pembiayaan Netto	481.394.715

Gambar 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Argorejo Tahun Anggaran 2023



Gambar 5. Hasil Pembuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Argorejo Tahun Anggaran 2023 yang di Publikasikan ke publik



Gambar 6. Penyerahan sertifikat yang diberikan oleh Bapak Lurah Kepada Pengabd

KESIMPULAN

Penyelenggaraan kegiatan pengabdian masyarakat pendampingan pembuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) di Kalurahan Argorejo, Kapanewon Sedayu, Kabupaten Bantul dapat terlaksana dengan baik melalui kegiatan pendampingan sesuai tujuan. Pendampingan dilakukan dengan diskusi bersama staf pegawai kalurahan yang bersama-sama memberikan kontribusi pembuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) dan mencari penyelesaian permasalahan dan kendala yang terjadi ketika pembuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal). Kegiatan ini mendapat sambutan baik dari seluruh perangkat desa di Kalurahan Argorejo dalam pendampingan pembuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) karena pentingnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) yang digunakan sebagai dasar penggunaan dana, dan pelaksanaan kegiatan, selain itu Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) juga sebagai bentuk transparansi pemerintah kepada publik.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat berlangsung dengan baik, lancar serta tanpa adanya kendala. Terima kasih kepada Pemerintah Kalurahan Argorejo dan seluruh perangkat kalurahan lainnya yang sudah menerima pelaksanaan pendampingan ini.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Amane, A. P. O., Boliti, S. A., Matorang, H. D., Jayalangi, L. S., & Septiana, G. L. (2022). Pendampingan Penyusunan RKPDes Tahun Anggaran 2023 di Desa Popisi, Kecamatan Banggai Utara Kabupaten Banggai Laut. *ABDISOSHUM: Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Sosial dan Humaniora*, 1(3), 364-373.
- [2] Hasnawati, S., Yuningsih, Y., Hendrawaty, E., & Marvinita, R. (2022). Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan BUMDesa Rejosari Makmur Kecamatan Pringsewu-Kabupaten Pringsewu. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 2(5), 573-580.
- [3] Kuntadi, C., Irianto, F., & Yunintasari, H. S. (2023). Faktor-faktor yang Memengaruhi Perencanaan Anggaran Pendapatan Asli Daerah: Komitmen Organisasi, Produk



- Domestik Regional Bruto, dan Jumlah Penduduk. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 4(3), 548-554.
- [4] Rizal, R., Fitri, S. A., & Rantika, D. (2019). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2016. *Jurnal Al-Iqtishad*, 14(1), 20-37.
- [5] Triyani, Y., Suhartono, S., Siagian, D., & Harjati, L. (2021). Program Pendampingan, Pelatihan Akuntansi Sederhana Secara Manual Dan Terkomputerisasi Bagi Usaha Kecil Mikro Dan Menengah (Umk) Anggota Koperasi Garudayaksa Di Jakarta Selatan. *J-Abdi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(4), 441-448.
- [6] Yanti, Y., & Putri, A. A. (2022). Pendampingan Penyusunan Anggaran Rencana Kegiatan Pemerintah Desa Pada Desa Tegalsawah, Karawang Timur, Jawa Barat. *SINAR SANG SURYA: Jurnal Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1), 152-157.
- [7] Yati, Y. U., Amin, M. S., & Utami, S. W. (2018). Pelatihan Penyusunan Rencana Anggaran Biaya Infrastruktur Desa Bagi Perangkat Desa Di Desa Karangbendo Kecamatan Rogojampi. *J-Dinamika: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1).